



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD HERU ACHADI HARI
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 924044

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

725.462.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 183.037.000
2. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 98.278.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 44.280.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/36 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.778.000
5. Tanah Seluas 976 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/32 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 94.371.000
8. Tanah Seluas 1672 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 48.944.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 70.668.000
10. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA PACITAN, WARISAN Rp. 39.106.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

89.000.000



1. MOBIL, GEELY MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	79.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	528.150.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.342.612.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.342.612.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.